



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRMA ISNAFIA ARIEF
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 641181

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.981.005.058**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m²/140 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
2. Tanah Seluas 916 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m²/23 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/40 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.051.005.058

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **365.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
4. MOBIL, SUZUKI IGNIS MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **50.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **696.003.424**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.092.008.482
III. HUTANG	Rp.	767.293.058
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.324.715.424

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.